



EVALUASI SAKIP SEMESTER I PERANGKAT DAERAH

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN LAMONGAN**

Oleh : PUJOBROTO IRIAWAN P, S.E., M.M., M.Kes.





SELAYANG PANDANG DPMPTSP



HISTORY PTSP

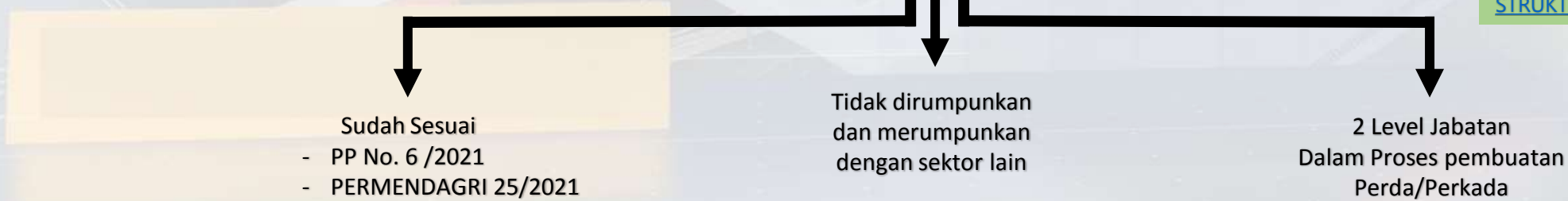


NOMENKLATUR

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Perda No. 5 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah

STRUKTUR ORGANISASI







TUGAS & FUNGSI

DPMPTSP

KABUPATEN LAMONGAN





- **DASAR HUKUM**

1. **PERDA KABUPATEN LAMONGAN NO. 5 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH, SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH 18 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN.**
2. **PERATURAN BUPATI LAMONGAN NO. 81 TAHUN 2020 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN LAMONGAN**



Tugas

Merumuskan kebijakan teknis dan strategis, melaksanakan urusan pemerintahan dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu serta tugas pembantuan yang diberikan kepala daerah.

Fungsi

- a) **Perencanaan Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;**
- b) **Pembinaa Administrasi Dinas;**
- c) **Pembinaan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;**
- d) **Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;**
- e) **Pembinaan Pelaksanaan Surat Perintah Kerja dan Surat Perintah Membayar Urusan Pemerintahan di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;**
- f) **Penyelenggaraan Promosi, Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, Pengendalian Penanaman Modal;**
- g) **Pengendalian Kebijakan di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;**
- h) **Evaluasi dan Pelaporan dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;**
- i) **Penyelenggaraan Fungsi Lain Yang diberikan Oleh Bupati Terkait dengan Tugas dan Fungsinya.**





PERJANJIAN KINERJA **DPMPTSP**

KABUPATEN LAMONGAN





POHON KINERJA **DPMPTSP**

KABUPATEN LAMONGAN



POHON KINERJA DPMPTSP

TUJUAN : MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI,
MENGOPTIMALISASI REFORMASI BIROKRASI MELALUI
PENINGKATAN KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP
LAYANAN PUBLIK

SASARAN : MENINGKATNYA REALISASI INVESTASI PMDN DAN PMA,
MENINGKATNYA PELAYANAN PERIZINAN, NILAI SAKIP DPMPTSP

PENINGKATAN IKLIM INVESTASI

Penetapan Pemberian
Kemudahan dibidang PM yg
Menjadi Kewenangan Daerah

Evaluasi Pelaksanaan
Pemberian Kemudahan
Investasi

Pembuatan Peta
Investasi Kab/Kota

Penyediaan Potensi
dan Peluang Usaha

PENINGKATAN PROMOSI INVESTASI

Penyenggaraan Promosi
Investasi yg Menjadi
Kewenangan Daerah
Kab/Kota

Penyusunan Strategi
Promosi Investasi

Pelaksanaan Kegiatan
Promosi Investasi

PENGENDALIAN PELAKSANAAN INVESTASI

Pengendalian Pelaksanaan
Investasi yg menjadi
Kewenangan Daerah Kab/Kota

Koordinasi dan Sinkroisasi
Pemantauan Investasi

Koordinasi dan
Sinkronisasi Pembinaan
Investasi

Koordinasi dan
Sinkronisasi Pengawasan
Investasi

PENGELOLAAN DATA PM

Pengelolaan data dan
informasi perizinan dan non
perizinan

Pengelolaan Data dan
Informasi Perizinan dan
NonPerizinan

PELAYANAN PENANAMAN MODAL

Pelayanan Perizinan dan
Nonperizinan Secara Terpadu
Satu Pintu

Penyediaan Pelayanan Terpadu
Perizinan dan Nonperizinan

Pemantauan Pemenuhan Komitmen
Perizinan dan Nonperizinan

Level Kinerja

Kinerja Strategis
Daerah

Kinerja Urusan/
Sub Urusan

Kinerja Taktikal

Kinerja Operasional

LAMONGAN

LAMONGAN

POHON KINERJA DPMPSTP

TUJUAN : MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI, MENGOPTIMALISASI REFORMASI BIROKRASI MELALUI PENINGKATAN KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP LAYANAN PUBLIK

INDIKATOR : % PERTUMBUHAN EKONOMI, INDEKS REFORMASI BIROKRASI

SASARAN : MENINGKATNYA REALISASI INVESTASI PMDN DAN PMA, MENINGKATNYA PELAYANAN PERIZINAN, NILAI SAKIP DPMPSTP

INDIKATOR : % PENINGKATAN REALISASI INVESTASI PMDN, % PENINGKATAN REALISASI INVESTASI PMA, SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT, NILAI SAKIP DPMPSTP

PENINGKATAN IKLIM INVESTASI

PENINGKATAN PROMOSI INVESTASI

PENGENDALIAN PELAKSANAAN INVESTASI

PENGELOLAAN DATA PM

PELAYANAN PENANAMAN MODAL

INDIKATOR
% PENINGKATAN MINAT INVESTASI

INDIKATOR
% PROMOSI PENANAMAN MODAL YG DILAKSANAKAN

INDIKATOR
% PENGENDALIAN PERUSAHAAN YG BERINVESTASI

INDIKATOR
% DATA SISTEM INFORMASI PM YG DIKELOLA

INDIKATOR
JUMLAH PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Penetapan Pemberian Kemudahan dibidang PM yg Menjadi Kewenangan Daerah

Pembuatan Peta Investasi Kab/Kota

Penyenggaraan Promosi Investasi yg Menjadi Kewenangan Daerah Kab/Kota

Pengendalian Pelaksanaan Investasi yg menjadi Kewenangan Daerah Kab/Kota

Pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan

Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu

Jumlah fasilitas/Kemudahn PM yang diberikan

Tersedianya Peta potensi dan peluang investasi

Jumlah Penyelenggaraan Promosi PM

Pembinaan Penanaman Modal PMA dan PMDN

Jumlah data dan sistem informasi PM yang terintegrasi

Jumla Penyelesaian Izin Melalui OSS dan Sistem Daerah

Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Kemudahan Investasi

Penyediaan Potensi dan Peluang Usaha

Penyusunan Strategi Promosi Investasi

Pelaksanaan Kegiatan Promosi Investasi

Koordinasi dan Sinkroisasi Pemantauan Investasi

Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Investasi

Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Investasi

Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan NonPerizinan

Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan

Pemtauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan

Dokumen Pemberian Fasilitas/Insentif PM

Jumlah peta data potensi investasi yang dikembangkan

Jumlah Dokumen Strategi PM

1. Keg Pemeran PM
2. Jumlah Pemeliharaan Balaiho

Jml Perusahaan yg Terpantau Perkembangannya Melalui Pelaksanaan PM

Jml Persahaan yg dibina melalui LKPM

Jml PMA/PMDN yg diawasi

Jumlah Penyediaan Aplikasi Data yang di Updad

1. Jumlah IzinUsaha yg diterbitkan
2. Jml Pelayanan Izin Penunjang Usaha yg diterbitkan

Konsultasi Perizinan dan Nonperizinan PM



CASCADING DPMPTSP

KABUPATEN LAMONGAN



CASECADING KINERJA

LAMONGAN



TUJUAN : MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI SECARA INKLUSIF MELALUI OPTIMALISASI POTENSI SEKTOR UNGGULAN, MENGOPTIMALISASI REFORMASI BIROKRASI MELALUI PENINGKATAN KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP LAYANAN DAN KAPASITAS MANAJEMEN PEMERINTAHAN HINGGA KE DESA

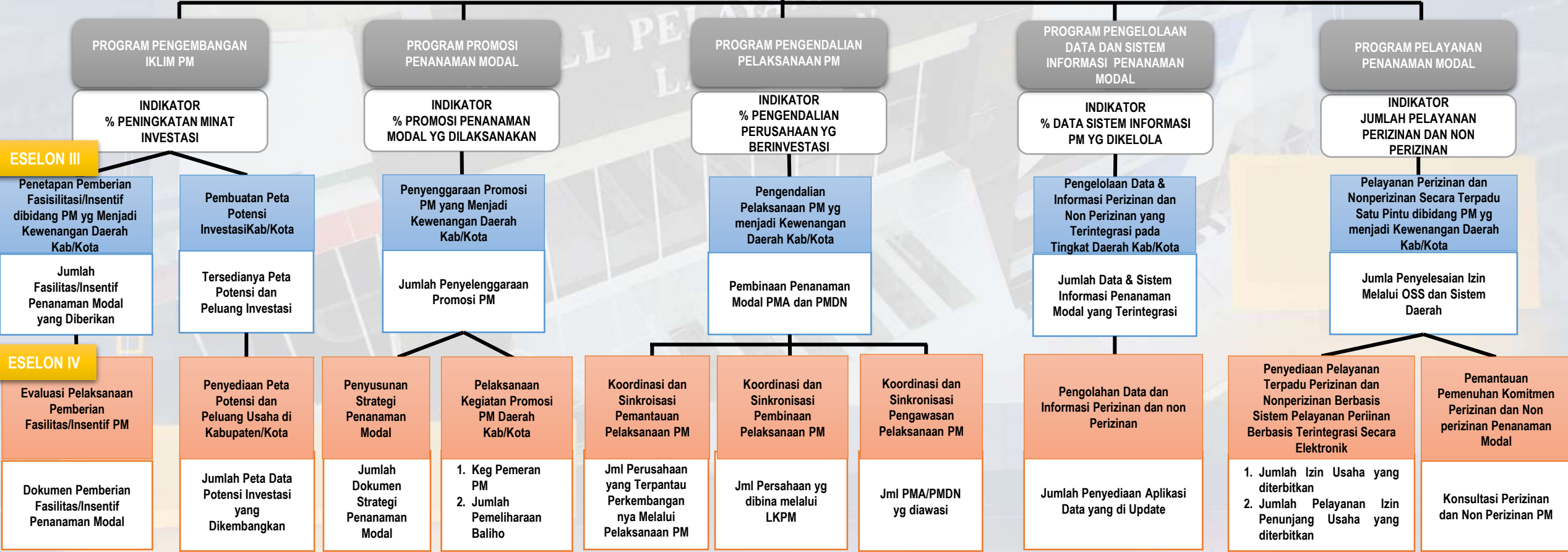
INDIKATOR : % PERTUMBUHANEKONOMI, INDEKS REFORMASI BIROKRASI

KEPALA DAERAH ←

KEPALA OPD ←

SASARAN : MENINGKATNYA REALISASI INVESTASI DAERAH BAIK PMDN MAUPUN PMA, MENINGKATNYA PELAYANAN PERIZINAN, NILAI SAKIP DPMPSTP

INDIKATOR : % PENINGKATAN REALISASI INVESTASI PMDN, % PENINGKATAN REALISASI I NVESTASI PMA, SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT, NILAI SAKIP DPMPSTP





KESELARASAN TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM DPMPTSP DENGAN RPJMD 2021 - 2026

RPJMD PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN				RENTRA DPMPTSP			PROGRAM	
MISI 1	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR
Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Daerah Melalui Optimalisasi Potensi Sektor Unggulan Daerah	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Melalui Optimalisasi Potensi Sektor Unggulan	Meningkatkan Efektivitas Investasi	Persentase Peningkatan Realisasi Investasi	Meningkatkan Realisasi Investasi	Meningkatnya Realisasi Daerah	1. Prosentase Realisasi Investasi PMA 2. Prosentase Realisasi Investasi PMDN 3. Penyelesaian Perizinan Tepat waktu	1. Pengembangan Iklim Penanaman Modal 2. Promosi Penanaman Modal 3. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 4. Pelayanan Penanaman Modal 5. Pengelolaan data & Sistem Informasi Penanaman Modal	1. Prosentase Realisasi Investasi thd Minat Investasi 2. Prosentase Promosi Penanaman Modal yg Dilaksanakan 3. Prosentase Pengendalian Perusahaan yg Berinvestasi 4. Jumlah Perizinan yang Diterbitkan Dalam Satu Waktu 5. Prosentase Data & Sistem Informasi PM yang Dikelola

SASARAN RPJMD MENJADI DASAR TUJUAN RENSTRA PD

Misi I



KESELARASAN TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM DPMPSTSP DENGAN RPJMD 2021 - 2026

RPJMD PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN				RENTRA DPMPSTSP			PROGRAM	
MISI 5	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM	INDIKATOR
Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis, serta Memberikan Pelayanan Publik yang Berkualitas sebagai Upaya Optimalisasi Reformasi Birokrasi	Mengoptimalkan Reformasi Birokrasi Melalui Peningkatan Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan dan Kapasitas Manajemen Pemerintahan hingga ke Desa	Meningkatnya Layanan Publik yang Inovatif	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Meningkatkan Layanan Publik yang Inovatif	Meningkatnya Pelayanan Perizinan	1. Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai Sakip	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	1. Nilai IKM Dinas PMPTSP

SASARAN RPJMD MENJADI DASAR TUJUAN RENSTRA PD



Misi V



Indikator Kinerja Utama (IKU)

DPMPTSP

KABUPATEN LAMONGAN





INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

SASARAN	INDIKATOR UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
Meningkatkan Efektivitas Investasi	Prosentase Peningkatan Realisasi Investasi	$\frac{\text{Jumlah Nilai Realisasi Investasi Tahun Berjalan} - \text{Jumlah Nilai Realisasi Investasi Tahun Dasar}}{\text{Jumlahl Realisasi Investasi Tahun Dasar}} \times 100$	Data Realisasi Investasi Tribulan	Bidang Promosi dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal
Meningkatnya Pelayanan Publik yang Inovatif	Nilai IKM	Berdasarkan Survey IKM/SKM	Hasil IKM/SKM	Bidang Pelayanan Perizinan dan Subag Umum dan Kepegawaian
Meningkatnya Realisasi Investasi Daerah baik PMA maupun PMDN	Prosentase Peningkatan Realisasi Investasi PMDN	$\frac{\text{Jumlah Nilai Realisasi PMDN Tahun Berjalan} - \text{Jumlah Realisasi Investasi Tahun PMDN Dasar}}{\text{Jumlah Realisasi PMDN Tahun Dasar}} \times 100$	Data Realisasi Investasi Tribulan	Bidang Pengendalian dan Pengolahan Data Penanaman Modal

CAPAIAN KINERJA
TERHADAP IKD
Semester I

DPMPTSP

KABUPATEN LAMONGAN





EVALUASI CAPAIAN KINERJA TERHADAP IKD DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

DPMPPTSP

No	Indikator Kinerja	Rumus	Tahun Dasar 2020	Target 2022		Realisasi		Capaian
				(%)	(Rp /jml)	(%)	(Rp)	
1.	Prosentase peningkatan Realisasi Investasi	$\frac{\text{Jumlah nilai realisasi investasi tahun berjalan} - \text{Jumlah nilai realisasi investasi tahun dasar}}{\text{Jumlah realisasi investasi tahun dasar}} \times 100$	489.288.897.090	1,5%	496.628.230.546	-28%	352.626.000.000	71%
2	IKM/SKM Layanan perijinan	Berdasarkan Survey KM	81,78	83,22	-			

CAPAIAN KINERJA TERHADAP IKU Semester I

DPMPTSP

KABUPATEN LAMONGAN





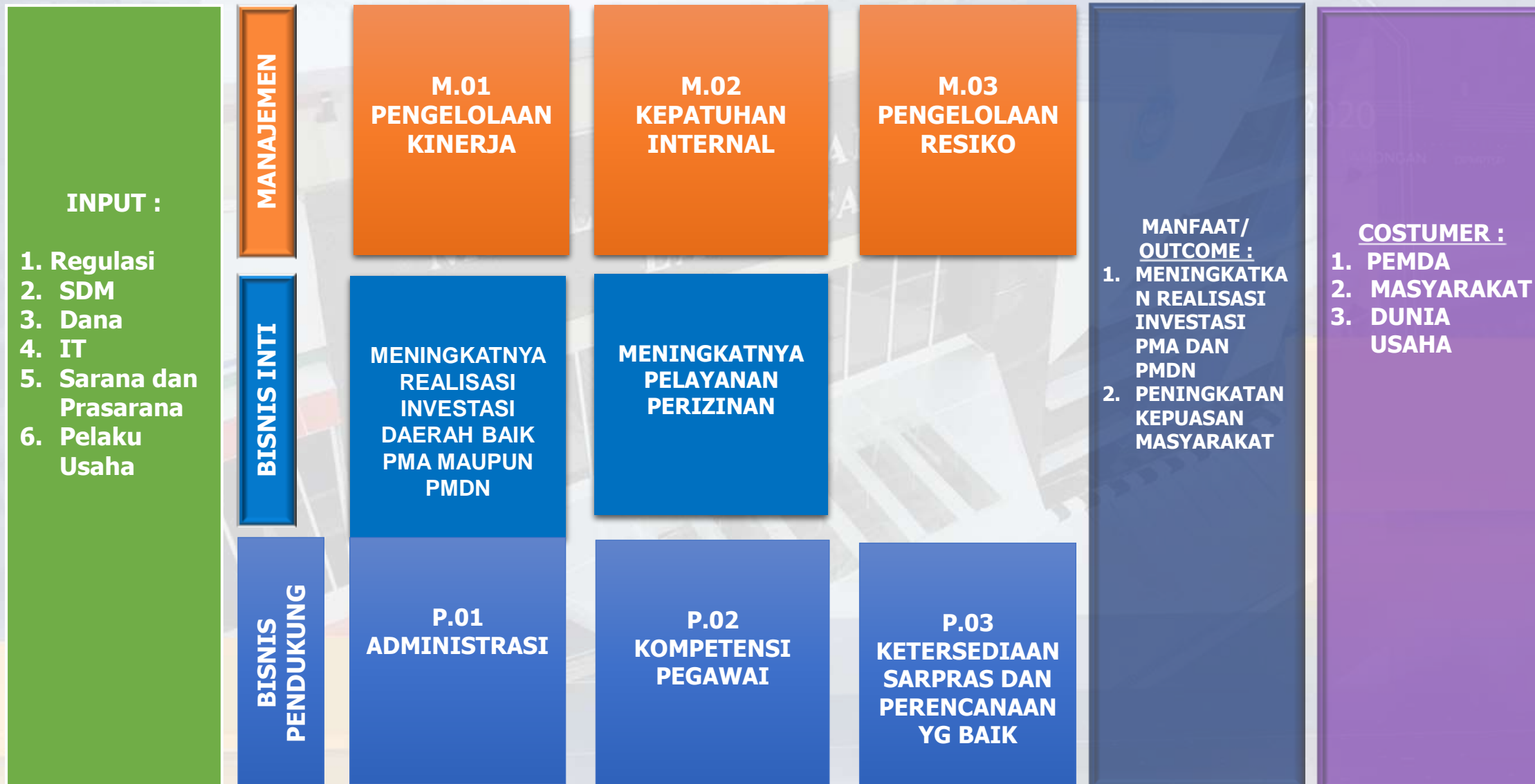
PROSES BISNIS **DPMPTSP**

KABUPATEN LAMONGAN





IDENTIFIKASI SKEMA PROSES BISNIS DPMPTSP





Pengelolaan Kinerja

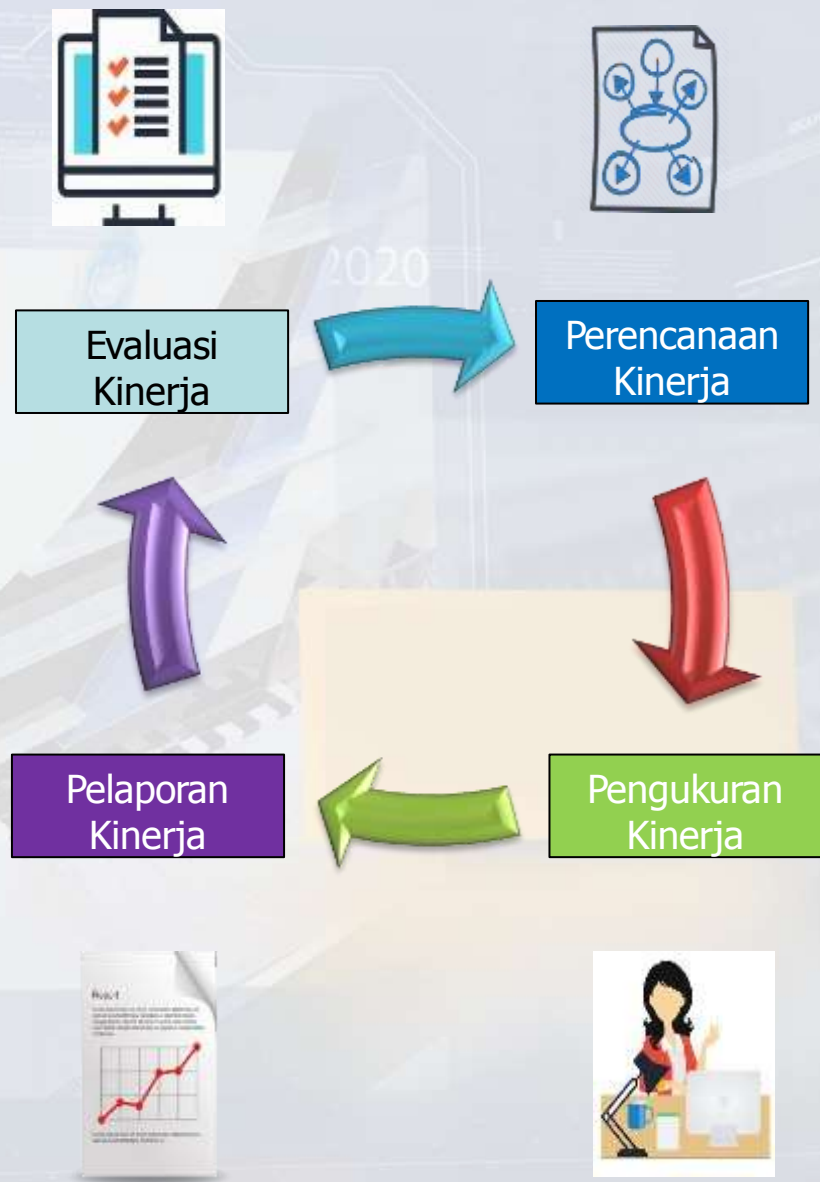
- Menyelaraskan visi dan misi, sesuai dengan Renstra. Dalam Pengelolaan Kinerja Dinas Penanaman modal dan PTSP selalu berpedoman pada indikator indikator yang sudah di tetapkan. Pengelolaan Kinerja juga menyentuh aspek kepatuhan Internal dan Pengelolaan Resiko

Kepatuhan Internal

- Mengevaluasi kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang sesuai Tupoksi dan SOP

Pengelolaan resiko

- memaksimal kan pencapaian tujuan dengan jalan merencanakan solusi sesuai dengan permasalahan yang mungkin muncul





1

MENINGKATNYA
INVESTASI DAERAH
BAIK PMA MAUPUN
PMDN



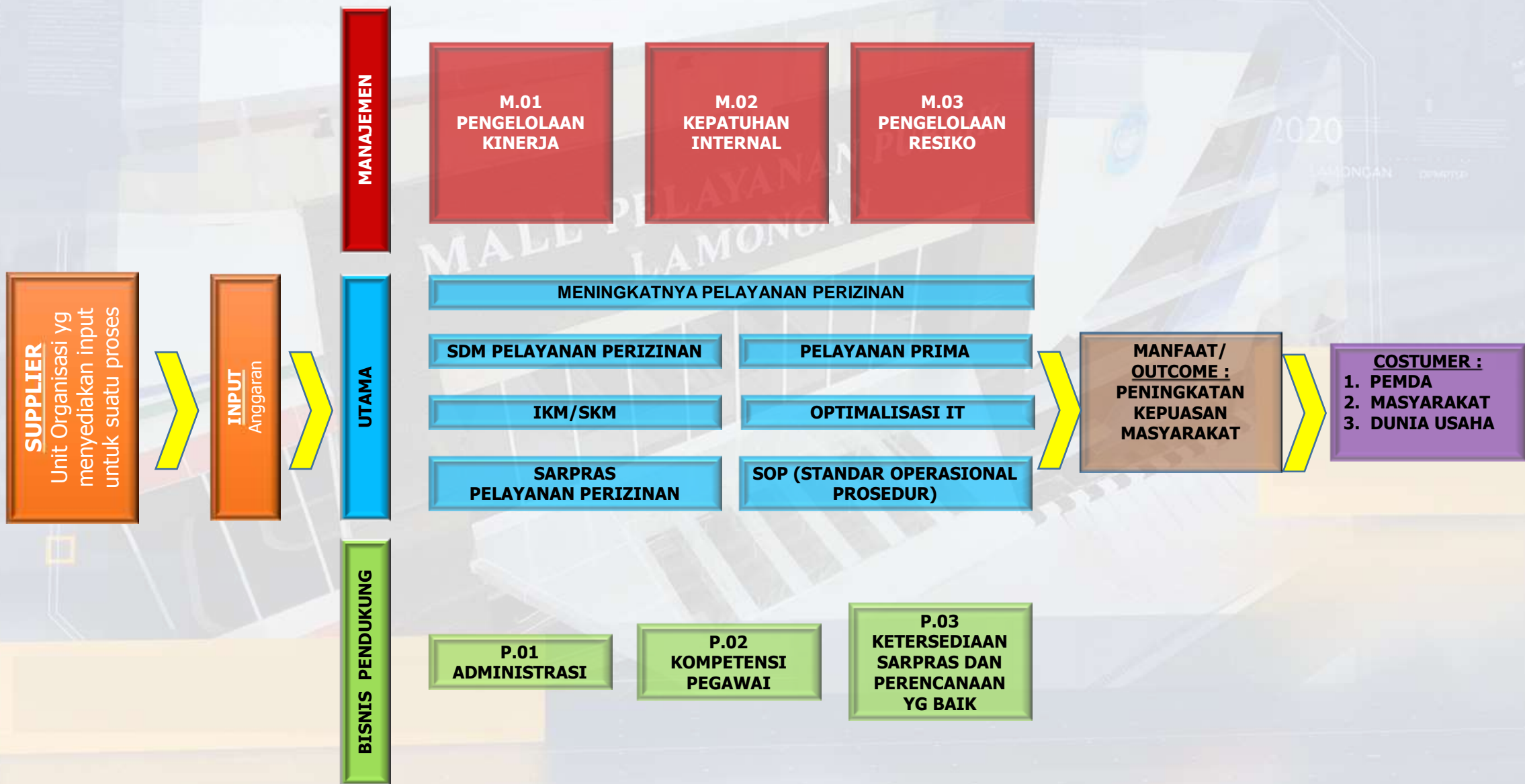
2

MENINGKATNYA
PELAYANAN
PERIZINAN





PROSES BISNIS MENINGKATNYA PELAYANAN PERIZINAN





PROSES PENDUKUNG DALAM PELAKSANAAN OPERASIONAL PADA DPMPSTSP

Peraturan perundang Undangan meliputi Tupoksi Organisasi

SDM (Kompetensi dan Kesadaran Pegawai)

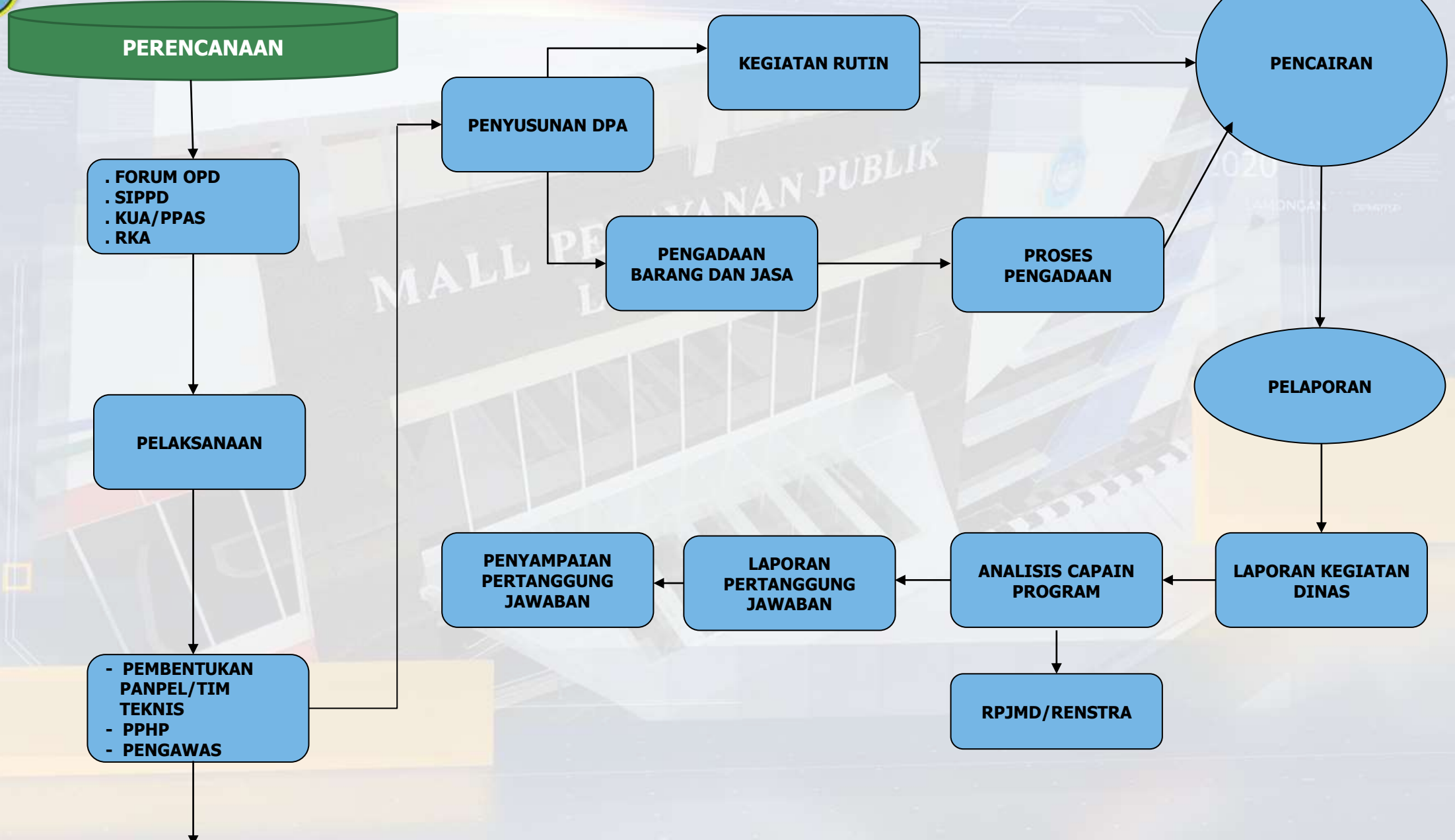
Ketersediaan Sarana dan Prasarana serta Teknologi Informasi

Perencanaan yang baik

Ketersediaan Anggaran yang cukup



PROSES BISNIS PENDUKUNG DALAM PELAKSANAAN OPERASIONAL PADA DPMPSTP



LANJUTAN

MONITORING & EVALUASI

- Pembuatan Tim Monitoring dan Evaluasi
- Penyiapan Schedule Daftar Kegiatan Yang Akan Dimonev

Rapat Koordinasi Peserta rakor meliputi Tim Monev dan Kabid

Kegiatan Rutin

Pelaksanaan Monitoring dengan Kunjungan Ke Lapangan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Capaian Kinerja

Pelaporan Hasil Monitoring Lapangan

Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Capaian Kinerja

Acuan Pertimbangan Penyusunan Rencana Kegiatan

Penyusunan Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi

MALL PELAYANAN PUBLIK LAMONGAN



MITIGASI RESIKO **DPMPTSP**

KABUPATEN LAMONGAN





Identifikasi Resiko Strategis OPD

Urusan Wajib/Pilihan : Penanaman Modal



Sebelum Evaluasi

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Resiko			Sebab		C/UC	Dampak		Skala Dampak	Sekala Kemungkinan	Nilai Resiko	Rencana Tindak Pengendalian
			Uraian	Kode Resiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
A	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara inklusif melalui optimalisasi potensi sektor unggulan	Prosentase pertumbuhan ekonomi	Pengembangan Potensi Investasi Kurang Optimal	RS01	Bupati Lamongan	Adanya pandemi Covid-19	Eksternal	C	Prosentase pertumbuhan ekonomi rendah	Bupati Lamongan	4	3	12	Pemerintah Daerah melakukan pengakselerasian belanja daerah
1	Meningkatkan Efektifitas Investasi	Jumlah Nilai Realisasi Investasi PMDN	Potensi Investasi PMDN menurun	RS02	Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Pajak Daerah yang tinggi	Eksternal	C	Nilai Realisasi Investasi rendah	Investor	4	3	12	Memberikan kemudahan dan stimulus dalam perpajakan
		Jumlah Nilai Realisasi Investasi PMA	Potensi Investasi PMA menurun	RS03	Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Regulasi dipandang masih rumit	Eksternal	C	Nilai Realisasi Investasi rendah	Investor	3	4	12	Membuat aturan yang saling terkait antara pusat dan daerah sehingga tidak tumpang tindih dan tidak menghambat investasi
		Jumlah Investor PMDN	Potensi Investasi PMDN menurun	RS04	Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Mekanisme pengurusan izin usaha yang terlalu panjang dan berbelit	Eksternal	C	Nilai Realisasi Investasi rendah	Investor	3	4	12	Melakukan pemangkasan birokrasi dengan sistem Pengurusan Izin Mandiri melalui aplikasi
a	Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah Investor yang berinvestasi di Kabupaten Lamongan	Banyak investor yang tidak mengetahui potensi Kab. Lamongan	RS05	Bidang Promosi dan Pengendalian Iklim	Kurangnya informasi potensi investasi di Kab. Lamongan	Eksternal	C	Nilai Realisasi Investasi rendah	Investor	4	3	12	Mengupdate aplikasi informasi potensi investasi di Kab. Lamongan
b	Program Pengendalian Penanaman Modal	Jumlah Minat Investasi di Kabupaten Lamongan	Menurunnya jumlah investor PMA dan PMDN	RS06	Bidang Pengendalian dan Pengelolaan Data Penanaman Modal	Kurang pahamnya perusahaan akan kewajiban penyampaian LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal)	Eksternal	C	Nilai Realisasi Investasi rendah	Kepala Bidang Pengendalian dan Pengelolaan Data Penanaman Modal	3	4	12	Mengundang pengusaha dalam rangka pelaksanaan bimbingan teknis pengisian LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal)
2	Meningkatkan kualitas Pelayanan Perijinan	SKM Perijinan	Proses pengurusan izin lama dan berbelit	RS07	Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Alur koordinasi yang terlalu panjang dari DPMPPTSP ke Perangkat daerah lain	Eksternal	C	Tingkat Kepuasan Masyarakat rendah	Pelaku Usaha	3	3	9	Mengoptimalkan keberadaan Tim Teknis di Mall Pelayanan Publik
c	Program Pelayanan Penanaman Modal	Prosentase Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan tidak dapat dilaksanakan dengan Prima	RS08	Bidang Pelayanan dan Perizinan	SDM Pelayanan yang belum optimal	Eksternal	C	Tingkat Kepuasan Masyarakat rendah	Pelaku Usaha	3	2	6	Mengikuti diklat pelayanan publik untuk petugas pelayanan



Identifikasi Resiko Strategis OPD Urusan Wajib/Pilihan : Penanaman Modal



No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Setelah Evaluasi											RATA-RATA NILAI RESIKO			
			Resiko			Sebab		C/UC	Dampak		Skala Dampak	Sekala Kemungkinan	Nilai Resiko	Rencana Tindak Pengendalian	Rata-rata Level Dampak	Rata-rata Level Kemungkinan	Skala Resiko Komposit
			Uraian	Kode Resiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena							
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	
A	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara inklusif melalui optimalisasi potensi sektor unggulan	Prosentase pertumbuhan ekonomi	Pengembangan Potensi Investasi Kurang Optimal	RS01	Bupati Lamongan	Adanya pandemi Covid-19	Eksternal	C	Prosentase pertumbuhan ekonomi rendah	Bupati Lamongan	4	3	12	Pemerintah Daerah melakukan pengakselerasian belanja daerah	4	3	12
1	Meningkatkan Efektifitas Investasi	Jumlah Nilai Realisasi Investasi PMDN	Potensi Investasi PMDN menurun	RS02	Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Pajak Daerah yang tinggi	Eksternal	C	Nilai Realisasi Investasi rendah	Investor	4	3	12	Memberikan kemudahan dan stimulus dalam perpajakan	4	3	12
		Jumlah Nilai Realisasi Investasi PMA	Potensi Investasi PMA menurun	RS03	Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Regulasi, peraturan yang berlebihan, regulasi yang tidak konsisten	Eksternal	C	Nilai Realisasi Investasi rendah	Investor	3	4	12	Membuat aturan yang saling terkait antara pusat dan daerah sehingga tidak tumpang tindih dan tidak menghambat investasi	3	4	12
		Jumlah Investor PMDN	Potensi Investasi PMDN menurun	RS04	Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Mekanisme pengurusan Izin usaha yang terlalu panjang dan berbelit	Eksternal	C	Nilai Realisasi Investasi rendah	Investor	3	4	12	Melakukan pemangkas birokrasi dengan sistem Pengurusan Izin Mandiri melalui aplikasi	3	4	12
a	Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah Investor yang berinvestasi di Kabupaten Lamongan	Informasi mengenai potensi investasi tidak tersampaikan kepada para Investor	RS05	Kepala Bidang Promosi dan Pengendalian Iklim	Dana sosialisasi yang berkurang dikarenakan refocusing anggaran	Eksternal	C	Nilai Realisasi Investasi rendah	Investor	4	3	12	Menyelenggarakan atau mengikuti pameran investasi	4	3	12
b	Program Pengendalian Penanaman Modal	Jumlah Minat Investasi di Kabupaten Lamongan	Menurunnya jumlah investor PMA dan PMDN	RS06	Kepala Bidang Pengendalian dan Pengelolaan Data Penanaman Modal	Kurang pahamiannya perusahaan akan kewajiban penyampaian LKPM (Laporan Kegiatan Kegiatan Penanaman Modal)	Eksternal	C	Nilai Realisasi Investasi rendah	Kepala Bidang Pengendalian dan Pengelolaan Data Penanaman Modal	3	4	12	Mengundang pengusaha dalam rangka pelaksanaan bimbingan teknis pengisian LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal)	3	4	12
2	Meningkatkan kualitas Pelayanan Perijinan	SKM Perijinan	Proses pengurusan izin lama dan berbelit	RS07	Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Alur koordinasi yang terlalu panjang dari DPMPPTSP ke Perangkat daerah lain	Eksternal	C	Tingkat Kepuasan Masyarakat rendah	Pelaku Usaha	3	3	9	Mengoptimalkan keberadaan Tim Teknis di Mall Pelayanan Publik	3	3	12
c	Program Pelayanan Penanaman Modal	Prosentase Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan tidak dapat dilaksanakan dengan Prima	RS08	Kepala Bidang Pelayanan dan Perizinan	SDM Pelayanan yang belum optimal	Eksternal	C	Tingkat Kepuasan Masyarakat rendah	Pelaku Usaha	3	2	6	Mengikuti diklat pelayanan publik untuk petugas pelayanan	3	2	6



PETA RESIKO

Nama OPD : Dinas Penanaman Modal & PTSP
Kabupaten Lamongan

Tahun Penilaian : 2022

Periode yang dinilai : Periode RPJMD Tahun 2021-2026

Urusan Pemerintahan : Urusan Penanaman Modal

TINGKAT KEMUNGKINAN		TINGKAT DAMPAK				
URAIAN	KEMUNGKINAN	SANGAT KECIL	KECIL	SEDANG	BESAR	SANGAT BESAR
		1	2	3	4	5
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
SANGAT SERING	5	5	10	15	20	25
SERING	4	4	8	12	16	20
CUKUP SERING	3	3	6	9	12	15
JARANG	2	2	4	6	8	10
SANGAT JARANG	1	1	2	3	4	5



INOVASI PELAYANAN PERIZINAN **DPMPTSP**

KABUPATEN LAMONGAN



1 TRACKING ATAU PENGECEKAN STATUS IZIN



HASIL SCAN
AKAN MUNCUL
PADA TRACKING
STATUS IZIN



Klik Scan QR Code

Scan QR Code pada mobile dan
akan terdapat terjemah permohonan

2 LAYANAN PERIZINAN ONLINE PERZELA

PERIZINAN ELEKTRONIK LAMONGAN



Klik logo Perzela



Login jika sudah
memiliki akun perzela



3 Layanan Back Office (BO) DPNPTSP berfungsi:



- Verifikasi permohonan permohonan online dari office ahli BO
- Terjadi integrasi data pemohon ahli Back Office
- Preparasi Rekomendasi oleh Prongkol Daerah Izin
- Mulai verifikasi prasyarat, lampir, otomasi, verifikasi oleh Koki dan tanda tangan ahli Kepala Binas
- Verifikasi oleh Koki dan Kepala Bidang
- Penyusunan TE oleh Kepala Binas

Sesuai dengan perkembangan teknologi, digitalisasi pelayanan publik perlu diimplementasikan. Saat ini salah satu Di Kabupaten Lamongan melalui Digital Signature terdapat terjemah Perizinan yang berbanding ESSE Baku Sisi dan Sesi Baku.

Digital signature ini berupa QR code dan kode yang berisi informasi penting dokumen yang akan terjemah.

Kemampuan Digital Signature adalah:

- Menghasilkan dokumen elektronik
- Tidak palsu
- Dapat diandalkan
- Tidak bisa diubah
- Memastikan prosedur dokumen dengan sistem otomatis

Digital Signature premium dapat di tracking/scan menggunakan aplikasi PERZELA yang dapat di download di Play Store.



"Terdapatnya Elektronik Perizinan dapat
dijadikan dimajukan dan ekspresan"

"KAMI SIAP MEMBERIKAN PELAYANAN TERBAIK"



Terima Kasih



www.dpmptsp.lamongankab.go.id
dpmptsp@lamongankab.go.id

[@dpmptsp_lamongan](https://www.instagram.com/dpmptsp_lamongan)
[0322-322690](tel:0322-322690)

